



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

JL. DI. Panjaitan Kav.24 Gd. B Lantai 5, Kebon Nanas Jakarta 13410 Indonesia
TELEPON/FAX : 021-8517257

Nomor : S.261 /PPA /PSPA /PKL.2 /3 /2023

27 Maret 2023

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Surat Peringatan Ketiga Terkait Pemasangan SPARING

Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan (Daftar Terlampir)

di

Tempat

Menindaklanjuti surat nomor: S.217/SET/PEHKT/PKL.2/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan Terkait Pemasangan SPARING berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018, surat nomor: S.427/PPA/PSPA/PKL.2/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Surat Peringatan Kedua Terkait Pemasangan SPARING, dengan ini kami sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Berdasarkan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB XI terkait dengan ketentuan sanksi, menyatakan bahwa
 - a. Pasal 505 ayat 1, Menteri, Gubernur, atau wali kota menerapkan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan
 - b. PASAL 508 Sanksi administratif berupa: **teguran tertulis**, paksaan pemerintah, **denda administrasi**, pembekuan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha
 - c. Pasal 518 besaran denda administratif kriteria tidak melaksanakan persetujuan lingkungan berdasarkan tingkat pelanggaran: ringan, **sedang**, berat
 - d. LAMPIRAN XV Jenis dan tingkat Pelanggaran Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan, **nomor 20 yaitu tidak memasang alat pemantauan air limbah secara otomatis bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan termasuk tingkat pelanggaran sedang.**
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 tahun 2021 tentang PROPER, kriteria pemantauan SPARING menjadi kriteria PROPER di bidang PPA Aspek Ketaatan terhadap titik pencaatan, Ketaatan terhadap parameter, Ketaatan terhadap pelaporan, Ketaatan terhadap baku mutu dan ketaatan terhadap ketentuan teknis Tidak dilaksanakannya salah satu kriteria akan menyebabkan peringkat tidak taat (merah).

3. Dit PPA KLHK telah melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemasangan dan pengoperasian SPARING setiap tahunnya yaitu tahun 2020 tanggal 4, 5 dan 19 Februari kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, tanggal 10 – 12 November ditujukan kepada 34 DLH Provinsi dan 110 DLH Kab/Kota, sedangkan tahun 2021 dilakukan pada tanggal 8 Maret, 24 Mei dan pembahasan komitmen 27 Desember. Pada tahun 2022 dilaksanakan bimbingan teknis SPARING pada tanggal 28 Juli 2022 serta tahun 2023 dilaksanakan bimbingan teknis pada tanggal 3 Februari 2023.
4. Berdasarkan hasil evaluasi kami pada Februari tahun 2023, terdapat 110 perusahaan melaporkan pelaporan progress upaya pemasangan SPARING, dengan rincian yaitu 70 perusahaan status tender, 34 perusahaan status pemasangan, 6 perusahaan status pengoperasian. Sedangkan 74 perusahaan belum melaporkan status pelaporan pemasangan dan pengoperasian SPARING.
5. Berkaitan dengan angka 1 s/d 4, maka:
 - a. Perusahaan yang belum melakukan pendaftaran atau menyampaikan laporan status, **kami sampaikan teguran ketiga melalui surat ini sebagai peringatan**
 - b. Perlu kami sampaikan kami akan menyampaikan status perusahaan Saudara kepada Ditjen Penegakan Hukum KLHK, agar diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. Adapun untuk informasi lebih lanjut terkait materi peraturan, petunjuk teknis pemasangan SPARING, pertanyaan umum dapat diakses melalui link <http://sparing.ppkl.menlhk.go.id/#/peraturan>. Sedangkan kontak person pendaftaran maupun pelaporan dapat menghubungi operator Sparing pada jam kerja melalui link <http://sparing.ppkl.menlhk.go.id/#/entry/sparing>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

CH. Nety Widayati
NIP.19691225 199503 2 001



TembusanYth :

1. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DI Yogyakarta
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Provinsi Kalimantan Selatan
25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara
27. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara
28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo
29. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
30. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat
31. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
32. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
33. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
34. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara
35. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat
36. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua
37. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Pegunungan
38. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Selatan
39. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Tengah
40. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya

Lampiran I Surat. No. S.261 /PPA /PSPA /PKL.2 /3 /2023

Tanggal 27 Maret 2023

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan

1. PT Bara Mega Quantum
2. PT Jambi Resource
3. PT Injatama
4. PT Sumber Energi Jaya
5. PT. Bara Anugrah Sejahtera
6. PT SAN FU Indonesia
7. PT Kertas Padalarang
8. PT Idola Selaras Lestari
9. PT Leuwijaya Utama Textile
10. PT. Daya Pratama Lestari
11. PT. Prima Paper Indonesia
12. PT. Kusumahadi Santosa
13. PT. Sawit Mulia
14. PT. Henrison Inti Persada
15. PT. Sawit Anugrah Sejahtera
16. PT. Agro Sarimas Indonesia
17. PT. Swastisiddhi Amagra – Kampar
18. PT. Swastisidhi Amagra
19. PT. Tamora Agro Lestari
20. PT. Bumi Maju Sawit
21. PT. Damai Jaya Lestari Kolaka
22. PT. Sutopo Lestari Jaya
23. PT Tekindo Energi
24. PT. Paser Buen energy
25. PT. Komunitas Bangun Bersama
26. PT. Ghani Raya Mandiri
27. PT. Guruh Putra Bersama
28. PT. Berau Bara Abadi
29. PT. Mampala Jaya
30. PT Sinar Kumala Naga
31. PT. Borneo Bara Timur Mandiri site samboja kutai kartanegara kaltim
32. PT. Nuansa Sakti Kencana
33. PT. Tiara Bara Borneo
34. PT. Candra Gemilang
35. PT. Karya Silvi
36. PT. Bumi Petangis
37. PT. Mutiara Etam Coal
38. CV. Makkari Tutu Abadi
39. PT. Tambang Bumi Damai
40. PT. Lembuswana Perkasa
41. PT. Kaltim Jaya Bara
42. PT. Perusda Benuo Taka
43. Koperasi Mitra Tani
44. CV. Penajam Makmur Abadi
45. KSU. Tana Danum Taka
46. PT. La Tahzan Tenggara
47. PT. Apriadi Bersaudara
48. PT Borneo Surya Abadi
49. CV. Anugerah Bara Insan
50. PT Borneo Emas Hitam
51. PT. Energy Persada Nusantara Kab Berau
52. PT. Bara Setiu Indonesia

53. PT. Viracon Primer Coal
54. PT ade Putra Tanrajeng
55. PT. Kaltim Batumanunggal
56. PT Rinjani Kartanegara
57. PT Pada Idi
58. PT. Meskom Agro Sarimas
59. PT. Usaha Kita Makmur
60. PT Hutahaen Teluk Sono
61. PT. Kencana Utama Sejati
62. PT Stargate Pasific Recources
63. PT Bukit Telunjuk
64. PT Astaka Dodol
65. PT Manggala Alam Lestari
66. PT Buana Bara Ekapratama
67. PT. Triaryani
68. PT Andira Agro
69. PT Duta Alam Sumatera
70. CV Bara Mitra Kencana
71. PT Semesta Alam Permai
72. PT Sanggam Kahuripan Indonesia
73. PT Sepanjang Inti Surya Utama 2
74. PT. Pipit Mutiara Indah

Mengetahui,



Suryanta Sapta Atmadja, S.TP.,
M.Si